

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyikapi perkembangan dunia internasional bangsa Indonesia perlu waspada dalam menghadapi berbagai kemungkinan terhadap ancaman yang timbul dari luar, ancaman keamanan yang terjadi saat ini telah berbeda dari yang bersifat tradisional menjadi non tradisional berupa munculnya aksi radikalisme, fundamentalisme, dan ekstremisme yang terjadi diberbagai belahan dunia. Melalui konsep pertahanan Indonesia yaitu Sistem Pertahanan Semesta dengan melibatkan seluruh warga negara beserta sumber daya nasional yang diharapkan mampu menegakkan kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang timbul dari berbagai aspek.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.34 Tahun 2004 TNI, terkait dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tiap-tiap Satuan Komando Wilayah (Satkowil) diberikan tugas yang salah satunya adalah perbantuan terhadap pemerintahan daerah. Tugas tersebut dilakukan dengan cara Pembinaan Teritorial (Binter), upadaya pengelolaan pertahanan di daerah dengan pendekatan atau metode pembinaan dari aspek komunikasi sosial, ketahanan wilayah, dan bakti TNI.

Pada umumnya, masyarakat menilai dengan keberadaan berbagai kesatuan teritorial Angkatan Darat di lingkungan mereka bermanfaat untuk menciptakan suatu stabilitas keamanan. Keberadaan kesatuan teritorial Angkatan Darat dapat berperan dalam menengahi berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan sehingga terkadang membuat sulit untuk disatukan dan seringkali menimbulkan gesekan sosial. Oleh karena itu, TNI telah berupaya melakukan restrukturisasi fungsi di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan memposisikan diri sebagai pihak yang turut menciptakan keteraturan sosial.

Satuan Komando Wilayah merupakan perwujudan dari sistem komando teritorial yang memiliki sejarah yang panjang dimulai dari masa merebut kemerdekaan dan melahirkan strategi pertahanan. Dengan tujuan yaitu mencapai perlindungan teritorial, kedaulatan, dan keselamatan bangsa. Komando teritorial merupakan bentuk pemerintahan darurat militer yang mencerminkan fungsi pertahanan dan kemudian dinamakan “Tentara dan Teritorium” sebagai akar dari Komando Daerah Militer (Kodam) untuk mengelola sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan (widjojo, 2007).

Komando teritorial dalam konteks Binter merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishanta) yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu segenap potensi wilayah untuk kepentingan pertahanan yang merupakan fungsi pembinaan teritorial (Binter) TNI (Adiwijoyo, 2002).

Keberadaan komando teritorial TNI AD dianggap berperan penting dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial politik yang memberikan kemudahan dalam menghadapi konflik eksternal maupun internal, menjamin terjalannya hukum, tatanan dan kontrol politik, perbantuan bencana dan penanganan terorisme. Mengingat besarnya nilai guna Satkowil TNI AD di tengah-tengah masyarakat, tugas pengamanan wilayah kemudian dicantumkan dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Satuan Komando Wilayah terdiri dari tingkatan satuan teritorial, dari satuan teritorial yang memiliki cangkupan wilayah yang luas seperti Kodam hingga yang memiliki cangkupan wilayah yang sempit seperti Koramil. Kodam atau Komando Daerah Militer merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat, Korem atau Komando Resor Militer merupakan komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Kodam, Kodim atau Komando Distrik Militer merupakan komando pembinaan dan operasional di Korem.

Komando Rayon Militer atau Koramil adalah satuan teritorial yang berada ditingkat kecamatan merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang langsung berhadapan dengan pejabat dan masyarakat sipil, Koramil berada di bawah kendali Kodim. Sebagai Komando Teritorial yang paling rendah, Koramil sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata (berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis, dan

kondisi sosial dalam rangka menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg)

Untuk mendukung tugas Koramil dalam menyelenggarakan Binter (pembinaan teritorial) di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Babinsa sebagai mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan bertugas memberikan informasi awal terkini tentang kondisi dan satuan wilayah bagi pasukan tempur yang bertugas di wilayahnya. Semua harus dilaporkan pada komandannya pada kesempatan pertama.

Bintara Pembina Desa merupakan unsur TNI AD yang memiliki tugas dalam bidang pertahanan keamanan seperti pelaksanaan pembinaan kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya, pada pelaksanaan tugasnya bekerjasama dengan berbagai kalangan seperti Kecamatan, Kelurahan, Kepolisian, serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah binaan demi meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman yang berasal baik dari dalam maupun dari luar. Babinsa menjadi kunci utama dalam hal mendeteksi ancaman, gangguan, dan permasalahan yang dapat mengganggu serta merusak sendi-sendi pertahanan maupun keamanan negara.

Perlu masyarakat ketahui, Babinsa merupakan ujung tombak informasi dari satuan TNI, khususnya TNI AD. Maka dari itu, perlu ada kerjasama

antara anggota TNI dan masyarakat dapat terjalin komunikasi yang baik serta saling menguntungkan, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan perkembangan situasi yang terjadi saat ini, menuntut Babinsa agar memiliki kepekaan, kepedulian, serta kewaspadaan dalam upaya mengikuti perkembangan yang sedang terjadi dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Babinsa yang merupakan ujung tombak dalam rangka menghadapi perkembangan situasi yang sedang terjadi di masyarakat Babinsa diharuskan mampu untuk mewujudkan pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungannya sehingga menciptakan pribadi yang dicintai, dihormati, dan disegani melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok TNI AD. Keberadaan Babinsa yang kehadirannya di wilayah akan selalu diharapkan dan didambakan oleh masyarakat.

Babinsa yang merupakan mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga terlibat aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keberhasilan ini dapat terwujud apabila pelaksanaan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sehingga menjadi kekuatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melihat kondisi masyarakat dalam wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran seperti keadaan geografis, demografis,

keadaan sosial, serta munculnya berbagai kepentingan masyarakat. Komunitas masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran sangat beragam, seperti Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Komunitas masyarakat yang beragam yang berada di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran sehingga dapat menimbulkan beberapa perselisihan diantara kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas, Babinsa dihadapkan dengan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban oleh Bintara Pembina Desa (BABINSA) di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran sangat penting untuk dilaksanakan karena Babinsa bertanggung jawab atas pelaporan dan pengawasan kondisi demografis, kondisi sosial masyarakat yang berdampak pada pertahanan nasional.

Maka sangat perlu kerjasama antar masyarakat dan Babinsa untuk pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Pancoran, agar pengamanan wilayah dapat terlaksana dengan baik. Dikarenakan Babinsa dan masyarakat merupakan mitra kerja yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi babinsa dalam menjaga keamanan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibatasi guna mendapatkan data yang mendalam, maka penelitian yang akan dilakukan ini dibatasi pada:

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bintara Pembina Desa dalam Pembinaan Teritorial di wilayah teritorial Koramil 02/ Mampang.

C. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada judul penelitian, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Babinsa di wilayah Teritorial Koramil 02/ Mampang?
2. Bagaimanakah respon masyarakat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Babinsa di wilayah Teritorial Koramil 02/ Mampang?

D. Kegunaan Penelitian

Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal serta untuk membangun khasanah pengetahuan di dalam bidang pendidikan.

Praktis

- Untuk Kalangan Akademisi

Untuk menambah pengetahuan bagi akademisi pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya tentang pengetahuan mengenai Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Babinsa dalam Menjaga Keamanan.

- Untuk Tentara Nasional Indonesia

Memberikan informasi kepada TNI khususnya rekan-rekan Babinsa untuk selalu dapat bekerja lebih optimal dalam menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Untuk Masyarakat Umum

Memberikan informasi yang cukup valid dan pengetahuan, khususnya untuk masyarakat agar lebih sadar dengan lingkungan tempat tinggalnya, serta membantu Babinsa dalam menjalankan tugasnya dalam pengamanan wilayah di lingkungan masyarakat.

E. Kebaharuan Penelitian

Tabel 1.1 : Kebaharuan Penelitian

Judul	Tahun	Tujuan
Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Pengamanan Wilayah Di Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu	2018	untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas Bintara Pembina Desa (BABINSA)
Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam	2017	tentang peran dan fungsi TNI AD dalam

Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak		memberikan perbantuan terhadap pemerintah daerah
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indo/nesia	2011	menganalisis cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme.
Pemberdayaan Babinsa dalam Mencegah Aksi Radikalisme	2016	menguraikan tentang pemberdayaan Babinsa
Peran Babinsa dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Aksi Terorisme	2015	mengetahui peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini
Penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam Perspektif Penangkalan (Pre-emptif) dan Pencegahan (Preventif)	2017	untuk menanggulangi terorisme sehingga mampu menyentuh jantung permasalahan

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penelitian yang peneliti akan lakukan dengan judul *Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bintara Pembina Desa dalam Menjaga Keamanan* akan meneliti mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh di wilayah teritorialnya.